



ALCO REGIONAL SUMUT

s.d 31 Agustus 2022

Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara



Air Terjun Sijorni – P. Sidempuan



Ringkasan Eksekutif



Realisasi APBN Regional

s.d. 31 Agustus 2022 total pendapatan **Rp27,71 T** dan total belanja **Rp36,89 T** sehingga menghasilkan **Defisit regional sebesar Rp9,19T**



Deviasi realisasi Penerimaan atas proyeksi

Total deviasi sisi Pendapatan sebesar **-Rp2,29 T** dari pagu, disumbang oleh:
DJP (pajak) : **-Rp2,4 T (-56,00%)**
DJCB (bea cukai) : **Rp0,14 T (38,3%)**
PNBP/Hibah : **-Rp0,03T (-15,3%)**



Deviasi realisasi Pengeluaran atas proyeksi

Total deviasi sisi Belanja sebesar **Rp2,12 T** disumbang oleh:
Belanja K/L: **Rp0,49 T (24%)**
TKDD: **Rp1,63 T (74,3%)**



Realisasi I-Account APBD

s.d. 31 Agustus 2022 mencapai Pendapatan **Rp30,75 T**, Belanja **Rp28,28 T** dan Pembiayaan Daerah **Rp3,18 T** dan akumulasi SiLPA **Rp5,66 T**



Kontribusi TKDD pada APBD

Realisasi TKDD terhadap pendapatan APBD s.d 31 Agustus 2022 sebesar **Rp21,21 T** (54,12% dari pagu) dengan kontribusi sebesar **68,96%** dari total Realisasi APBD



Perkembangan Ekonomi Regional

PDRB Regional pada tw II 2022 **tumbuh sebesar 4,70%** dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Agustus 2022, Sumatera Utara mengalami deflasi **sebesar 0,30 % (m-to-m)**. Bea Keluar tumbuh didorong kinerja dari pertumbuhan ekspor kelapa sawit dan produk turunannya sejak akhir 2020.



Policy Response

Terhadap Rencana kenaikan harga BBM pada September 2022, peran TPID Sumut diperlukan dalam stabilisasi harga dan ketahanan pangan. Serta perlunya akselerasi belanja sehingga mampu meningkatkan ekonomi di Sumut

STRATEGIC DASHBOARD ALCo REGIONAL s.d 31 Agustus 2022

COVID UNCERTAINTY

Dinamika Covid terus berlanjut namun lebih terkendali

Covid Updates :

PPKM Level 1 Berlanjut, Situasi Membaik



- Kasus Covid-19 di Prov. Sumatra Utara mengalami kenaikan akibat perkembangan varian Omicron
- Jumlah vaksinasi dosis 1 : 11,19 juta (98,08%)
- Jumlah vaksinasi dosis 2 : 9,58 juta (83,87%)
- Jumlah vaksinasi dosis 3 : 3,67 juta (37,30%)

Neraca Perdagangan:

Kinerja Neraca perdagangan pada regional Sumatra Utara semakin baik (m-to-m)



Ekspor

Ekspor ↓



Impor

Impor ↑

Inflow kembali meningkat meski tetap volatile

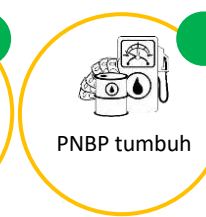
Fiskal : Percepatan realisasi belanja pemerintah pusat dan daerah didukung perbaikan kinerja pajak dan posisi kas yang likuid menjadi stimulus akselerasi PDB hingga Agustus 2022 (y-on-y)



PPh 21, Impor, Badan PPN ↑



BK ↑
BM ↑
Cukai ↑



PNBP Lainnya ↑
PNBP BLU ↑



Barang ↓
Modal ↓
Pegawai ↑



DAU ↑
DBH ↓

Sektor Riil : Pemulihan konsumsi RT dan aktivitas korporasi membaik seiring dengan terkendalinya Covid-19.



- Mobilitas mulai pulih
- IKK dan Indeks penjualan ritel tetap Baik meski menurun dibanding bulan sebelumnya



- Impor barang modal Naik
- Investasi mulai tumbuh



- Deflasi sebesar 0,3%
- Inflasi volatile food deflasi 1,48%

Risiko-Risiko

1. Risiko Pandemi Covid dan program vaksinasi
 - Peningkatan tren kasus Covid 19
 - Adanya varian baru
 - Kecepatan vaksinasi
2. Risiko Penerimaan Perpajakan
3. Risiko Inflasi meningkat akibat kebijakan kenaikan BBM
4. Risiko Realisasi Percepatan Belanja
4. Risiko lainnya.

Rekomendasi ALCo Regional



Normal



Perlu Perhatian



Perlu Perhatian Lebih Lanjut



Perlu Penanganan Khusus



APBN



Museum Tjong A Fie - Medan



Realisasi I-Account Wilayah Sumatera Utara s.d. 31 Agustus 2022

(miliar rupiah)

URAIAN	Pagu	2021 Realisasi s.d. Agustus	% Real	Pagu	2022 Realisasi s.d. Agustus	% Real	Growth (%)
A. Pendapatan dan Hibah	28.653,74	14.400,56	50,26	27.616,60	27.706,02	100,32	92,40%
I. Penerimaan Dalam Negeri	26.987,84	13.261,85	49,14	25.733,31	26.264,07	102,06	98,04%
1. Penerimaan Perpajakan	25.219,45	9.897,51	39,25	23.610,22	20.993,04	88,92	112,10%
2. Kepabeanaan & Cukai	1.768,39	3.364,34	190,25	2.123,09	5.271,04	248,27	56,67%
II. PNBP	1.665,89	1.138,71	68,35	1.883,29	1.441,94	76,57	26,63%
B. Belanja Negara	62.872,54	36.910,90	58,71	60.432,67	36.897,99	61,06	-0,03%
I. Belanja Pemerintah Pusat	21.074,06	11.680,16	55,42	20.294,8	11.255,73	55,46	-3,63%
1. Belanja K/L	21.074,06	11.680,16	55,42	20.294,8	11.255,73	55,46	-3,63%
2. Belanja Non K/L	0	0	0,00	0	0	0,00	0
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	41.798,48	25.230,74	60,36	40.134,75	25.642,26	63,89	1,63%
A. Transfer ke Daerah	37.273,19	23.056,83	61,86	35.737,97	22.551,48	63,10	-2,19%
B. Dana Desa	4.525,29	2.173,91	48,04	4.396,78	3.090,78	70,30	42,18%
C. Keseimbangan Primer	0	0	0,00	0	0	0,00	0
D. Surplus/Defisit Anggaran	-34.218,80	-22.510,34	65,78	-32.816,07	-9.191,97	28,01	-59,17%
E. Pembiayaan Anggaran	0	0	0,00	0	0	0,00	0
SILPA/(SiKPA)	-34.218,80	-22.510,34	65,78	-32.816,07	-9.191,97	28,01	-59,17%

Sumber : aplikasi OM-SPAN, aplikasi SIMTRADA

Kinerja APBN

- Pendapatan APBN di Sumatera Utara sebesar Rp27,71 T mengalami pertumbuhan sebesar Rp13,31 T, atau naik sebesar 92,40% dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Kenaikan tersebut paling besar disumbang oleh PPh non migas yang naik sebesar Rp9,84 T (149,11%)

Kinerja Belanja APBN

- Belanja Negara di Sumatera Utara sebesar Rp36,89 T mengalami kontraksi sebesar Rp0,012 T, turun 0,03% dibandingkan periode yang sama tahun 2021
- Belanja K/L mengalami kontraksi sebesar Rp0,42 T turun 3,63% dibanding tahun sebelumnya, terjadi penurunan realisasi Belanja Modal sebesar Rp0,43 T atau turun 20,57% (yoy)
- TKDD meningkat 1,63% atau sebesar Rp0,41 T. DBH yang mengalami kontraksi cukup dalam sebesar Rp580,50 M atau sebesar 54,40% (yoy), serta DAK Fisik yang meningkat sebesar Rp239,98 M atau sebesar 40,62%.

Surplus/Defisit APBN

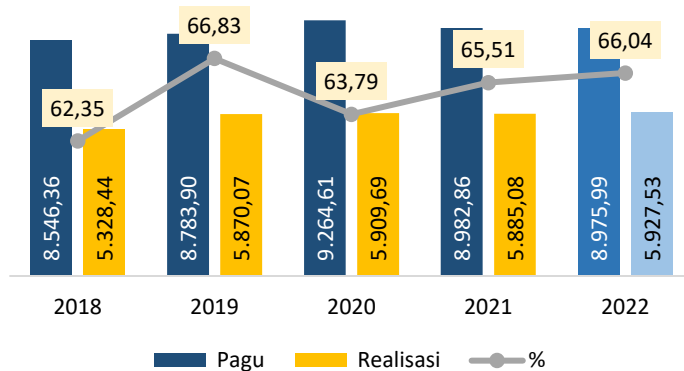
- Defisit APBN sebesar Rp9,19 T lebih baik 59,17% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp22,51 T

Belanja K/L di Provinsi Sumut Rp9,70 T

Terealisasi untuk pembayaran Gaji, Tunjangan, Operasional K/L dan penyaluran berbagai program PEN

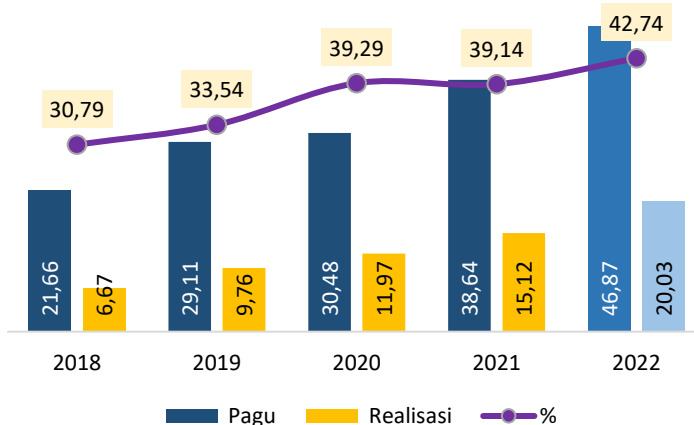
Belanja Pegawai

(miliar Rp)



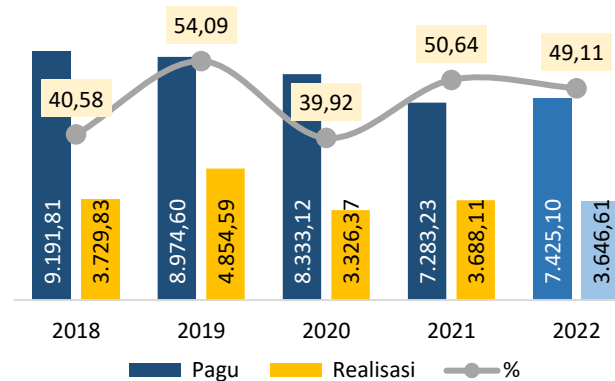
Belanja Bansos

(miliar Rp)



Belanja Barang

(miliar Rp)



Pemanfaatan:



PUPR : Rp663,56 M

→ Belanja Bantuan Lainnya dengan Karakteristik Bantuan Pemerintah Rp112,53 M



Kepolisian : Rp576,09 M

→ Belanja Operasional Rp288,59 M



Kemenhan : Rp372,32 M

→ Honor Operasional Satker Rp87,00 M



Menkumham : Rp269,25 M

→ Pengadaan Bahan Makanan Rp167,72 M

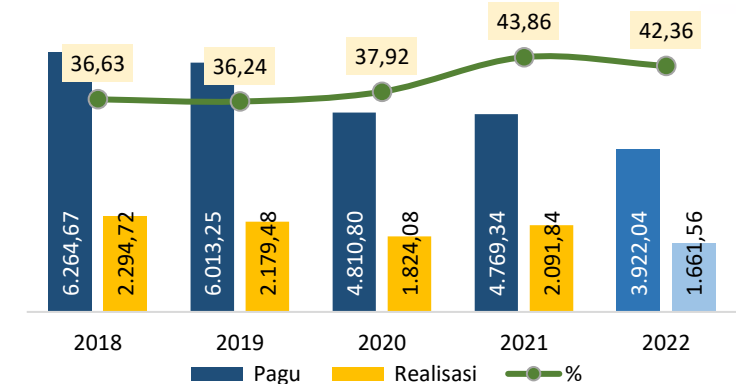


Kemenkes : Rp260,80 M

→ Belanja Gaji dan Tunjangan Rp102,02 M

Belanja Modal

(miliar Rp)



Pemanfaatan:



PUPR : Rp708,99 M

→ Belanja Modal jaringan Rp3299,69 M



Perhubungan : Rp626,01 M

→ Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp380,62 M



Kemenhan : Rp113,06 M

→ Belanja Gedung dan Bangunan Rp53,64 M



Pariwisata : Rp51,62

→ Belanja Gedung dan Bangunan Rp36,84 M



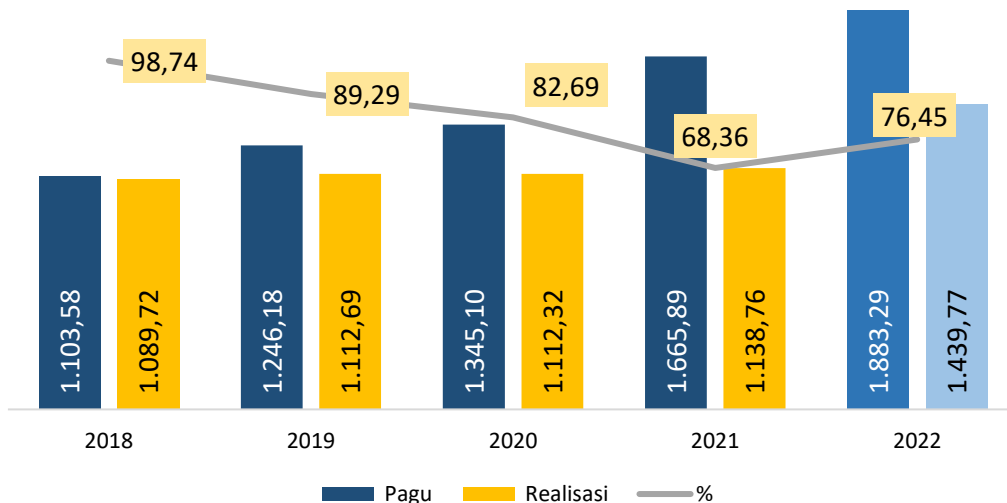
Kemenag : Rp47,46 M

→ Belanja Modal Gedung dan bangunan Rp27,07 MM

Sumber : Aplikasi OM-SPAN

KINERJA PNBP s.d 31 Agustus 2022

Realisasi PNBP s.d 31 Agustus 2022 Rp1.439,77 miliar



5 jenis pendapatan PNBP tertinggi per Agustus 2022 (miliar Rp)

No	Akun	Pendapatan
1	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	267,02
2	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	223,54
3	Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)	108,69
4	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	72,04
5	Pendapatan Biaya Pendidikan	70,66

Penerimaan PNBP per K/L



KEPOLISIAN

Rp298,52 M



MENKES

Rp270,27 M



MENHAN

Rp224,51 M



DIKNAS

Rp177,72



MENAG

Rp131,62 M

Realisasi PNBP sampai dengan 31 Agustus 2022 telah terealisasi 76,45% dari target. Realisasi tersebut naik 26,43% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

CAPAIAN TKDD s.d. 31 Agustus 2022

 **Real TKDD**
1,63%

2021	2022
25,23 T	25,64 T
60,36%	63,89%

Realisasi TKDD s.d 31 Agustus 2022

1. Penyaluran TKDD yang bersumber dari APBN kepada APBD s.d 31 Agustus 2022 telah terealisasi sebesar Rp25,64 triliun atau sebesar 63,89% dari pagu, realisasi tersebut meningkat 1,63% (yoy).
2. Penyaluran DAK Fisik sebesar Rp830,76 miliar atau sebesar 27,16% dari pagu. Realisasi tersebut tumbuh 40,62% (yoy).
3. Penyaluran Dana Desa sebesar Rp3,09 triliun atau sebesar 70,30% dari pagu. Realisasi tersebut tumbuh 42,18% (yoy)

 **-54,40%**

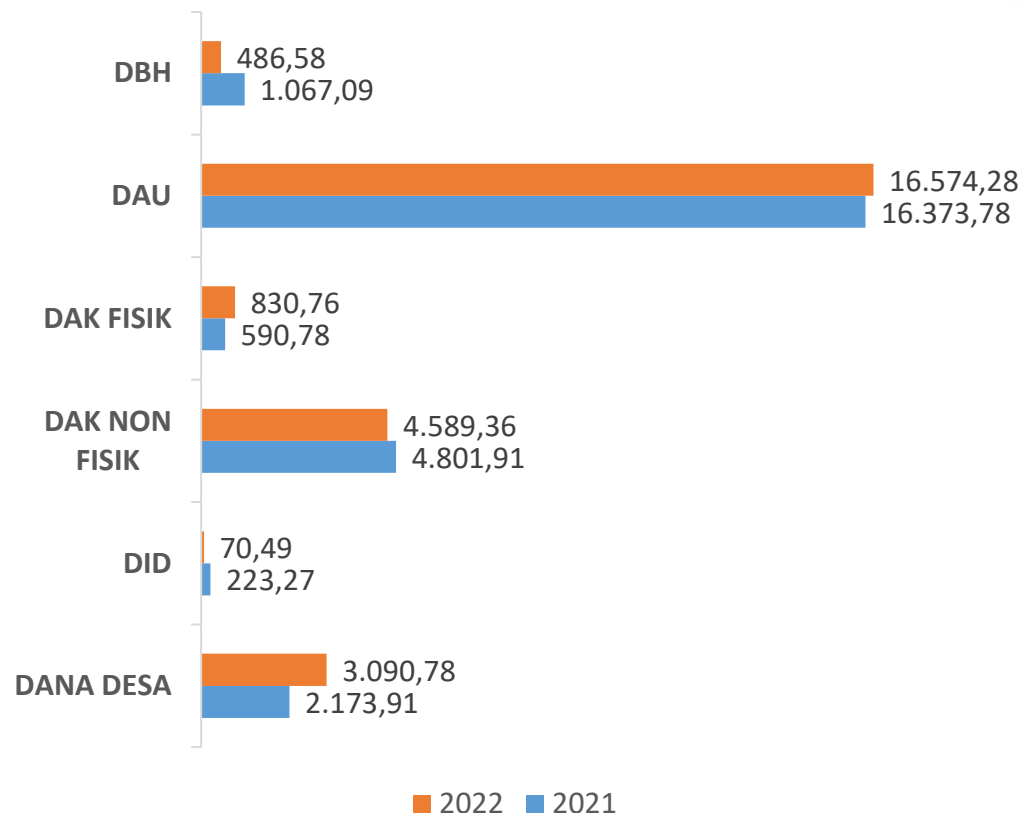
 **1,22%**

 **40,62%**

 **-4,43%**

 **-68,43%**

 **42,18%**



Sumber : aplikasi OM-SPAN dan Simtrada



Rincian Realisasi I-Account Wilayah Sumatera Utara s.d. 31 Agustus 2022

(miliar rupiah)

URAIAN	2021			2022			% growth
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	
A. Pendapatan dan Hibah	28.653,74	14.400,56	50,26	27.616,60	27.706,02	100,32	92,40%
I. Penerimaan Dalam Negeri	28.653,74	14.400,56	50,26	27.616,60	27.706,02	100,32	92,40%
1. Penerimaan Perpajakan	26.987,84	13.261,85	49,14	25.733,31	26.264,07	102,06	98,04%
a. Pajak Dalam Negeri	26.177,18	10.494,25	40,09	24.410,77	21.707,43	88,93	106,85%
i. Pajak Penghasilan	13.263,57	6.596,92	49,74	12.104,79	16.433,38	135,76	149,11%
- Migas	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-99,33%
- Non Migas	13.263,57	6.596,82	49,74	12.104,79	16.433,38	135,76	149,11%
ii. Pajak Pertambahan Nilai	11.055,95	2.827,77	25,58	10.461,70	4.224,12	40,38	49,38%
iii. Pajak Bumi dan Bangunan	520,99	253,92	48,74	729,31	151,57	20,78	-40,31%
v. Cukai	957,73	596,74	62,31	800,55	714,39	89,24	19,72%
vi. Pajak Lainnya	378,94	218,90	57,76	314,43	183,96	58,51	-15,96%
b. Pajak Perdagangan Internasional	810,67	2.767,60	341,40	1.322,54	4.556,65	344,54	64,64%
i. Bea Masuk	747,54	594,56	79,54	783,05	666,72	85,14	12,14%
ii. Bea Keluar/Pungutan Ekspor	63,13	2.173,04	3.442,20	539,48	3.889,93	721,05	79,01%
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.665,89	1.138,71	68,35	1.883,29	1.441,94	76,57	26,63%
c. PNBP Lainnya	635,54	653,19	102,78	800,11	857,44	107,17	31,27%
d. Pendapatan Badan Layanan Umum	1.030,35	485,51	47,12	1.083,19	584,51	53,96	20,39%
B. Belanja Negara	62.872,54	36.910,90	58,71	60.429,55	36.897,99	61,06	-0,03%
I. Belanja Pemerintah Pusat	21.074,06	11.680,16	55,42	20.294,80	11.255,73	55,46	-3,63%
1. Belanja Pegawai	8.982,86	5.885,08	65,51	8.981,37	5.927,53	66,00	0,72%
2. Belanja Barang	7.283,23	3.688,11	50,64	7.354,19	3.646,61	49,59	-1,13%
3. Belanja Modal	4.769,34	2.091,84	43,86	3.912,38	1.661,56	42,47	-20,57%
7. Bantuan Sosial	38,64	15,12	39,14	46,87	20,03	42,74	32,45%
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	41.798,48	25.230,74	60,36	40.134,75	25.642,26	63,89	1,63%
A. Transfer ke Daerah	37.273,19	23.056,83	61,86	35.737,97	22.551,48	63,10	-2,19%
a. Dana Perimbangan	36.826,64	22.833,56	62,00	35.606,46	22.480,99	63,14	-1,54%
i. Dana Transfer Umum	25.901,28	17.440,87	67,34	24.854,38	17.060,87	68,64	-2,18%
- Dana Bagi Hasil	3.213,85	1.067,09	33,20	2.162,44	486,58	22,50	-54,40%
- Dana Alokasi Umum	22.687,43	16.373,78	72,17	22.691,93	16.574,28	73,04	1,22%
ii. Dana Transfer Khusus	10.925,36	5.392,69	49,36	10.752,09	5.420,12	50,41	0,51%
- Dana Alokasi Khusus Fisik	2.975,40	590,78	19,86	3.059,24	830,76	27,16	40,62%
- Dana Alokasi Khusus NonFisik	7.949,96	4.801,91	60,40	7.692,85	4.589,36	59,66	-4,43%
b. Dana Insentif Daerah	446,54	223,27	50,00	131,51	70,49	53,60	-68,43%
c. Dana Otsus dan Keistimewaan	0	0	0	0	0	0	0,00%
B. Dana Desa	4.525,29	2.173,91	48,04	4.396,78	3.090,78	70,30	42,18%
C. Keseimbangan Primer	0	0	0	0	0	0	0,00%
D. Surplus/Defisit Anggaran	-34.218,80	-22.510,34	65,78	-32.812,95	-9.191,97	28,01	-59,17%
E. Pembiayaan	0	0	0	0	0	0	0,00%
V. Pembiayaan Lainnya	0	0	0	0	0	0	0,00%

Sumber : aplikasi OM-SPAN, aplikasi SIMTRADA (diolah)



PROYEKSI DAN CAPAIAN PENERIMAAN

Proyeksi Penerimaan pada bulan Agustus *overstated* sebesar **Rp 2,58 triliun** [realisasi Pajak lebih rendah Rp 2,4 triliun, realisasi Bea Cukai lebih tinggi Rp 140 miliar, dan realisasi PNBP dan Hibah lebih rendah Rp 36 miliar]. Pada bulan September 2022, penerimaan pajak diproyeksikan Rp 2,4 triliun , Bea Cukai Rp 730 miliar dan PNBP/Hibah Rp 221 miliar.

**Dalam ribuan rupiah*

No	Bulan	Pajak				BC				PNBP				
		Real	Proy	Real	Dev	Real	Proy	Real	Dev	Real	Real	Proy	Real	Dev
		2021	2022	2022		2021	2022	2022		2020	2021	2022	2022	
1	Januari	880.431.647	2.048.360.000	2.229.520.000	8,8%	243.758.599	181.080.582	533.435.765	194,6%	111.166.655	66.172.490	360.650.306	118.687.534	-67,1%
2	Februari	1.202.299.106	1.545.150.000	1.483.373.706	-4,0%	249.624.119	392.451.262	445.892.888	13,6%	109.854.051	68.084.397	322.796.149	72.290.523	-77,6%
3	Maret	1.216.868.308	1.662.938.760	1.542.829.098	-7,2%	438.804.336	553.674.391	651.608.377	17,7%	197.292.032	250.340.293	91.716.292	254.767.712	177,8%
4	April	2.204.997.472	2.325.335.483	9.393.128.601	303,9%	584.379.170	742.283.307	639.325.774	-13,9%	203.019.718	116.135.119	170.249.544	202.375.163	18,9%
5	Mei	1.456.680.031	4.840.095.100	2.987.635.465	-38,3%	462.599.682	658.157.900	317.710.877	-51,7%	76.797.801	117.926.862	228.819.907	106.535.584	-53,4%
6	Juni	1.107.214.209	4.485.941.800	4.995.921.258	11,4%	447.208.320	390.648.560	962.688.645	146,4%	207.996.415	217.917.826	149.533.338	245.874.163	64,4%
7	Juli	947.807.843	4.037.347.620	1.726.683.764	-57,2%	523.680.903	711.235.150	1.212.442.593	70,5%	87.628.227	168.945.836	182.490.938	238.936.517	30,9%
8	Agustus	1.380.956.483	4.297.060.040	1.889.457.787	-56,0%	414.281.256	367.294.570	507.930.889	38,3%	118.707.252	133.185.345	238.936.516	202.371.948	-15,3%
9	September	1.540.840.657	2.408.242.440			605.099.860	730.342.960			195.609.769	229.048.198	221.663.400		
10	Oktober	1.471.215.218				578.467.548				211.777.254	175.350.096			
11	November	2.388.141.832				613.132.956				132.724.506	205.537.069			
12	Desember	1.890.887.171				761.723.876				184.748.768	411.134.303			
TOTAL		17.688.339.977	27.650.471.243	26.248.549.679		5.922.760.625	4.727.168.682	5.271.035.808		1.837.322.448	2.159.777.834	1.966.856.390	1.441.839.144	

PENYEBAB
DEVIASI
Agustus



Deviasi Pajak bulan Agustus 2022 sebesar Rp 2,4 miliar
disebabkan oleh sudah berakhirnya program PPS

Deviasi Bea Cukai bulan Agustus 2022 sebesar Rp 140
miliar disebabkan oleh penerimaan bea masuk dan
bea keluar yang signifikan

Deviasi PNBP dan Hibah bulan Agustus 2022 sebesar
Rp 36 miliar disebabkan oleh penerimaan SDA migas
dan nonmigas yang meningkat

Notes: Understated proyeksi= realisasi > proyeksi ; Overstated proyeksi = realisasi < proyeksi

Sumber : aplikasi OM-SPAN dan metode ARIMA Autoregressive (diolah)



PROYEKSI DAN CAPAIAN PENGELUARAN

Proyeksi Belanja pada bulan Agustus 2022 *understated* sebesar **Rp 2,12 triliun** [realisasi Belanja K/L lebih tinggi Rp 488 miliar dan realisasi TKDD lebih tinggi Rp 1,63 triliun. Pada bulan September 2022, Belanja K/L diproyeksikan Rp 2,13 triliun dan TKDD diproyeksikan Rp 3,01 triliun.

(ribuan rupiah)

No	Bulan	Belanja K/L				TKDD			
		Real	Proy	Real	Dev	Real	Proy	Real	Dev
		2021	2022	2022		2021	2022	2022	
1	Januari	554.217.394	998.398.938	549.624.469	-45%	2.625.700.584	3.283.371.988	2.934.942.313	-11%
2	Februari	1.297.934.878	2.312.678.380	1.330.087.742	-42%	2.755.433.996	3.032.337.479	2.250.508.641	-26%
3	Maret	2.581.572.364	1.946.715.070	2.056.447.011	6%	3.656.191.878	2.542.222.486	3.010.914.279	18%
4	April	2.206.691.530	3.375.380.102	2.686.078.569	-20%	2.999.178.301	2.868.965.814	3.445.713.916	20%
5	Mei	3.528.973.531	1.915.459.081	1.559.306.875	-19%	4.322.137.095	3.239.540.565	2.393.723.407	-26%
6	Juni	2.420.519.847	2.099.222.473	3.241.797.257	54%	3.999.156.675	3.339.157.434	4.573.577.464	37%
7	Juli	2.191.053.003	4.132.552.435	2.925.424.510	-29%	1.712.264.530	3.291.341.337	2.197.472.800	-33,2%
8	Agustus	2.294.996.830	2.031.580.719	2.519.910.789	24%	3.173.930.167	2.197.472.800	3.830.909.805	74,3%
9	September	2.580.610.931	2.137.800.479			3.618.233.211	3.016.398.700		
10	Oktober	4.062.780.763				5.490.375.662			
11	November	3.052.910.887				3.602.786.987			
12	Desember	4.736.300.686				3.326.757.292			
TOTAL		31.508.562.644	20.949.787.677	16.868.677.222		41.282.146.378	26.810.808.603	24.637.762.625	

PENYEBAB
DEVIASI

Agustus

Notes: *Understated* proyeksi= realisasi > proyeksi ; *Overstated* proyeksi = realisasi < proyeksi

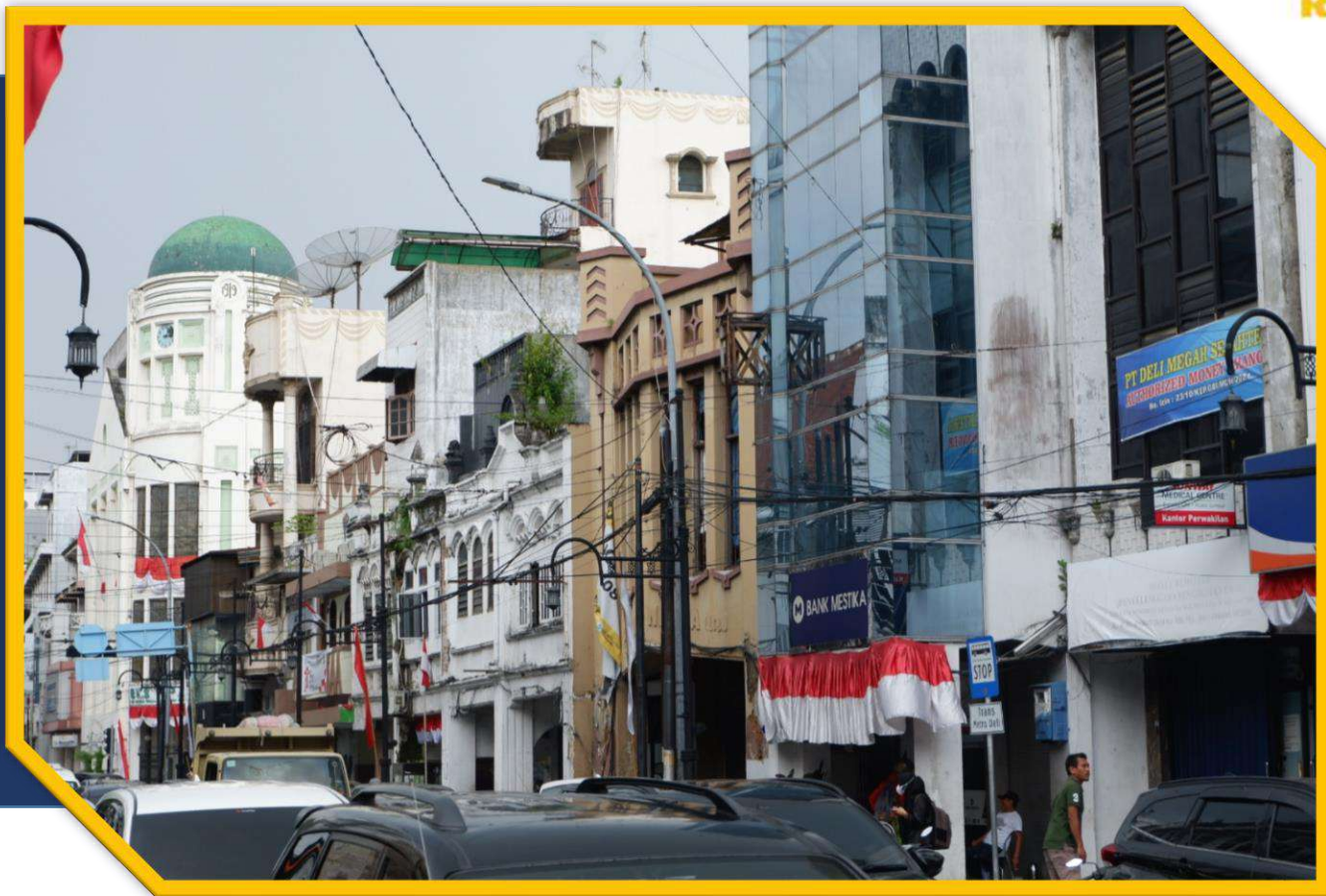
Deviasi Belanja K/L bulan Agustus 2022 sebesar Rp 488 miliar disebabkan oleh kontraksi belanja modal

Deviasi TKDD bulan Agustus 2022 sebesar Rp 1,63 triliun disebabkan oleh kontraksi realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Sumber : aplikasi OM-SPAN dan metode ARIMA Autoregressive (diolah)



APBD dan Kinerja TKDD



Jalanan Pusat Kota Medan



KINERJA APBD SUMUT 2022 PERLU DIOPTIMALKAN

Pendapatan Daerah masih disokong pendapatan transfer pemerintah pusat, realisasi belanja belum maksimal

(miliar rupiah)

JENIS TKDD	PAGU	REALISASI	%
1. DBH	2,162.44	486,58	22.50
2. DAU	22,691.93	16,574.28	73.04
3. DAK FISIK	3,059.24	830,76	27.16
4. DAK NON-FISIK	7,692.85	4,589.36	59.66
5. DID	131.51	70.49	53.60
6. DANA DESA	4,396.78	3,090.78	70.30
JUMLAH	40,134.75	25,642.26	63.89

Sumber : Aplikasi Simtrada

Selisih TKDD pada APBN dan APBD terjadi karena Pemda belum melaporkan APBDnya ke Portal DJPK

1. Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Sumatera Utara s.d 31 Agustus 2022 sebesar Rp30,75 T didominasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp21,21 T dan Pajak Daerah sebesar Rp6,18 T.
2. Realisasi Belanja APBD Provinsi Sumatra Utara s.d 31 Agustus 2022 sebesar Rp28,28 T didominasi Belanja Pegawai sebesar Rp12,34 T dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp5,94 T.
3. Angka kemandirian fiskal daerah 25,38% (PAD/Pendapatan Daerah), APBD masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
4. TKDD yang telah disalurkan kepada Provinsi Sumatera Utara s.d 31 Agustus 2022 sebesar Rp21,21 T atau 68,96% dari total Realisasi Pendapatan Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKDD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada provinsi Sumatra Utara
5. Dibandingkan tahun 2021, pada tahun 2022 terjadi penurunan pagu TKDD sebesar Rp1,97 triliun dan terjadi kenaikan realisasi sebesar Rp0,61 triliun.

AKUN	PAGU	REALISASI
Pendapatan Daerah	57.225,41	30.751,58
PAD	14.636,05	7.805,03
Pajak Daerah	11.337,70	6.182,21
Retribusi Daerah	752,87	231,14
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	708,09	554,52
Lain-Lain PAD yang Sah	1.837,39	837,17
Pendapatan Transfer	41.755,69	22.677,38
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	39.183,14	21.207,65
Pendapatan Transfer Antar Daerah	2.572,55	1.469,73
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	833,67	269,17
Pendapatan Hibah	166,62	263,44
Dana Darurat	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	667,05	5,73
Belanja Daerah	59.502,33	28.280,38
Belanja Operasi	40.120,40	19.414,01
Belanja Pegawai	21.766,31	12.335,74
Belanja Barang dan Jasa	14.936,26	5.944,01
Belanja Bunga	44,29	17,42
Belanja Subsidi	2,69	1,08
Belanja Hibah	3.117,25	1.052,36
Belanja Bantuan Sosial	253,60	63,40
Belanja Modal	9.303,59	1.969,72
Belanja Tidak Terduga	655,63	375,40
Belanja Transfer	9.422,71	6.521,25
Belanja Bagi Hasil	2.745,72	2.011,19
Belanja Bantuan Keuangan	6.676,99	4.510,06
Surplus/Defisit	- 2.276,92	2.471,20
Pembiayaan Daerah	2.276,92	3.185,20
Penerimaan Pembiayaan	2.608,98	3.401,71
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.126,03	3.158,24
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	467,75	243,39
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	15,20	0,07
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	332,06	216,51
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	224,19	152,49
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	101,52	64,02
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6,35	0,00

Sumber : Portal DJPK dan Kantor Pusat DJPb



Kinerja DFDD Regional Provinsi Sumatera Utara Periode s.d 31 Agustus 2022

No	Daerah	PAGU DAK Fisik	Realisasi
1	KAB. ASAHAN	95,70	28,41
2	KAB. BATUBARA	67,51	29,80
3	KAB. DAIRI	172,32	35,07
4	KAB. DELISERDANG	89,45	24,16
5	KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	131,13	32,77
6	KAB. KARO	92,10	17,75
7	KAB. LABUHAN BATU SELATAN	51,32	19,93
8	KAB. LABUHAN BATU UTARA	65,19	26,67
9	KAB. LABUHANBATU	44,78	21,09
10	KAB. LANGKAT	81,44	15,05
11	KAB. MANDAILING NATAL	96,81	39,16
12	KAB. NIAS	117,58	26,29
13	KAB. NIAS BARAT	154,99	42,64
14	KAB. NIAS SELATAN	125,39	68,83
15	KAB. NIAS UTARA	76,66	27,84
16	KAB. PADANG LAWAS	57,73	20,55
17	KAB. PADANG LAWAS UTARA	69,99	13,46
18	KAB. PAKPAK BARAT	66,29	19,86
19	KAB. SAMOSIR	83,11	31,87
20	KAB. SERDANG BEDAGAI	143,96	57,86
21	KAB. SIMALUNGUN	207,96	27,79
22	KAB. TAPANULI SELATAN	56,20	10,01
23	KAB. TAPANULI TENGAH	110,99	68,91
24	KAB. TAPANULI UTARA	69,16	36,25
25	KAB. TOBA SAMOSIR	95,64	12,62
26	KOTA BINJAI	40,42	22,48
27	KOTA GUNUNG SITOLI	43,08	21,12
28	KOTA MEDAN	34,67	3,28
29	KOTA PADANG SIDEMPUAN	22,36	9,44
30	KOTA PEMATANGSIANTAR	50,10	3,44
31	KOTA SIBOLGA	33,00	8,16
32	KOTA TANJUNGPALAI	31,31	6,17
33	KOTA TEBINGTINGGI	50,03	16,42
34	PROVINSI SUMATERA UTARA	330,88	66,18

(miliar rupiah)

Nama Desa	NON-BLT	BLT	
	REALISASI	Realisasi	KPM
KAB. ASAHAN	71,73	30,50	91.031
KAB. BATUBARA	55,04	31,82	74.193
KAB. DAIRI	58,20	30,41	81.033
KAB. DELISERDANG	144,40	103,82	238.808
KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	54,02	35,79	79.954
KAB. KARO	80,21	63,22	151.471
KAB. LABUHAN BATU SELATAN	25,87	18,15	40.452
KAB. LABUHAN BATU UTARA	35,93	15,49	34.380
KAB. LABUHANBATU	31,70	19,03	42.282
KAB. LANGKAT	100,29	67,20	149.334
KAB. MANDAILING NATAL	125,01	84,22	211.821
KAB. NIAS	80,13	31,54	79.643
KAB. NIAS BARAT	49,31	15,94	38.625
KAB. NIAS SELATAN	174,66	80,85	193.703
KAB. NIAS UTARA	51,51	31,40	70.989
KAB. PADANG LAWAS	100,05	50,76	127.397
KAB. PADANG LAWAS UTARA	134,15	23,84	79.462
KAB. PAKPAK BARAT	17,94	10,83	24.348
KAB. SAMOSIR	42,44	29,20	69.485
KAB. SERDANG BEDAGAI	87,44	36,72	61.398
KAB. SIMALUNGUN	139,34	66,04	196.056
KAB. TAPANULI SELATAN	74,55	48,20	108.962
KAB. TAPANULI TENGAH	64,07	25,88	86.268
KAB. TAPANULI UTARA	78,35	66,03	146.730
KAB. TOBA SAMOSIR	75,32	47,96	126.677
KOTA GUNUNG SITOLI	35,91	17,67	44.490
KOTA PADANG SIDEMPUAN	14,57	6,13	19.422
Grand Total	2.002,14	1.088,64	2.668.414

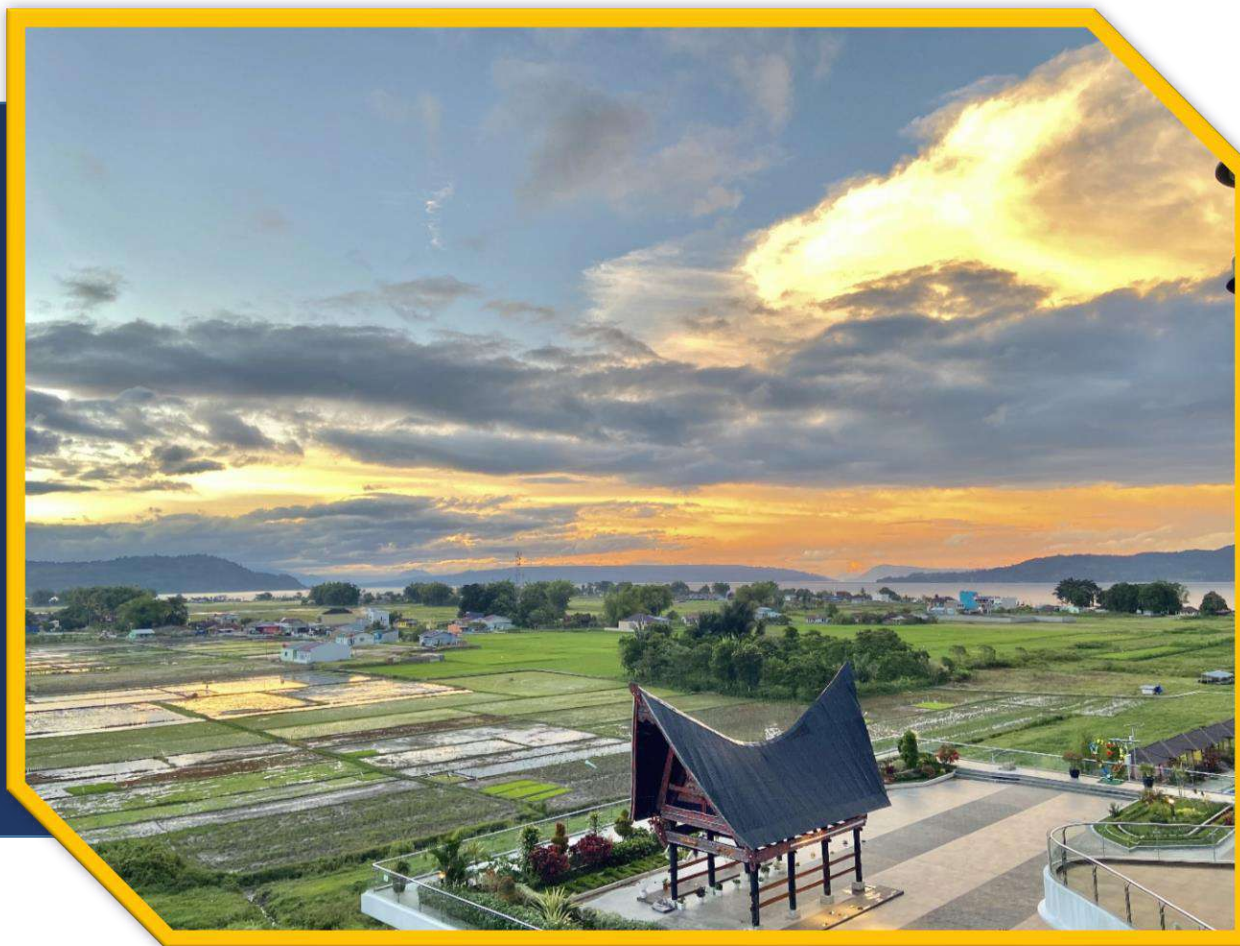
REKOMENDASI:

- Mendorong Kepala Daerah untuk memberikan instruksi percepatan realisasi TKDD, khususnya penyaluran DAK Fisik, DID dan DBH.
- Mendorong Pemda untuk meningkatkan koordinasi internal antar instansi yang terlibat dalam penyaluran TKDD.
- Menyediakan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi untuk mengelola penyaluran TKDD.
- Memperbanyak frekuensi Bimtek dan sosialisasi bagi operator keuangan Pemda terkait penyaluran TKDD
- Adanya layanan mengenai DAU, DBH dan DID yang bersifat online seperti hai DJPb
- Menginformasikan TKDD kepada masyarakat secara berkelanjutan melalui berbagai media komunikasi.





Perkembangan Ekonomi Regional Sumatera Utara

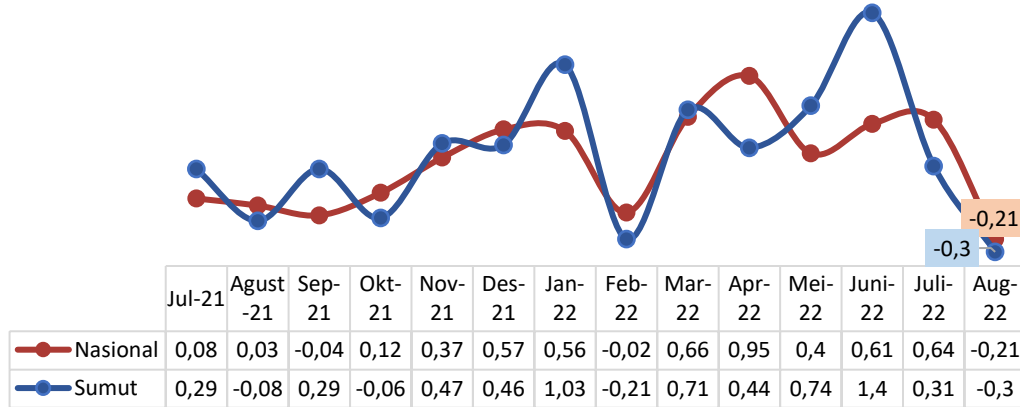


Pemandangan Kota Balige



PERKEMBANGAN EKONOMI REGIONAL SUMATERA UTARA

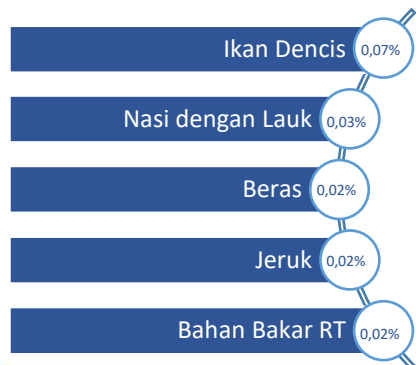
Inflasi Sumut dan Nasional pada Agustus 2021 s.d Agustus 2022 (persen)



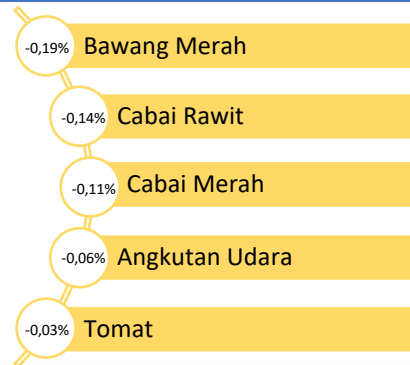
Sumut mengalami Deflasi sebesar -0,30%. Angka tersebut lebih rendah dibanding deflasi nasional sebesar -0,21%

Kewaspadaan:
Penurunan harga pangan pada komponen volatile food

KOMODITAS PENYUMBANG INFLASI

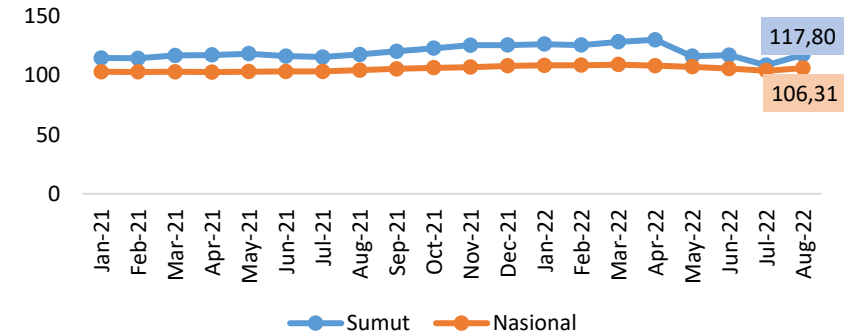


KOMODITAS PENYUMBANG DEFLASI

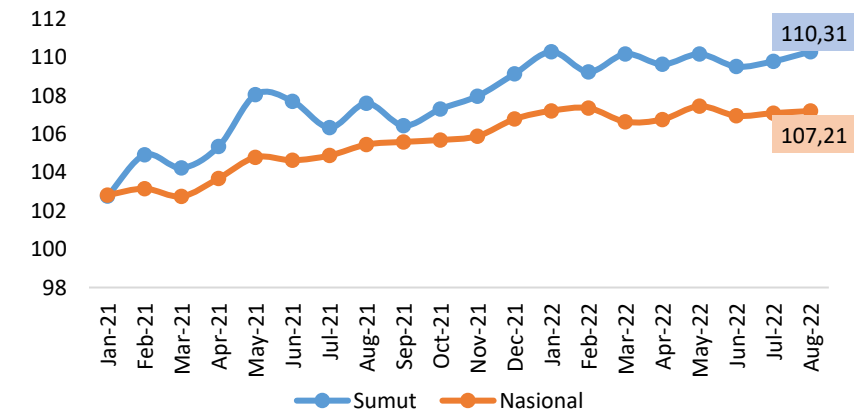


Sumber : BPS Sumut

NTP Sumut Periode 2021 s.d Agustus 2022



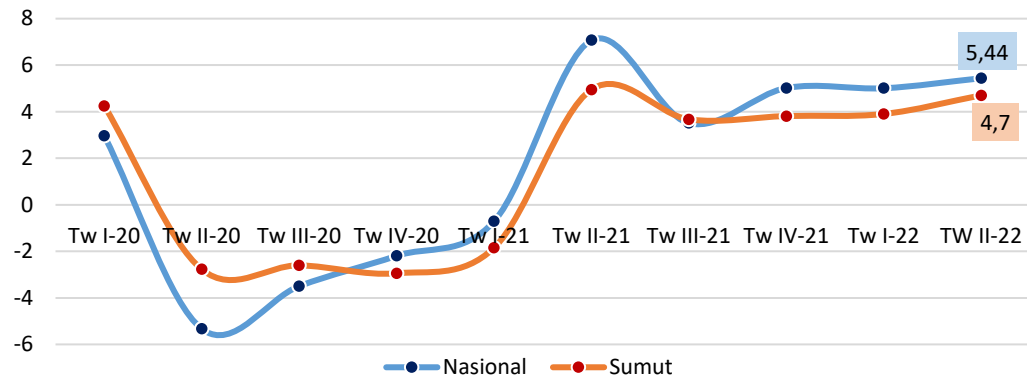
Nilai Tukar Nelayan (NTN) Periode 2021 s.d Agustus 2022



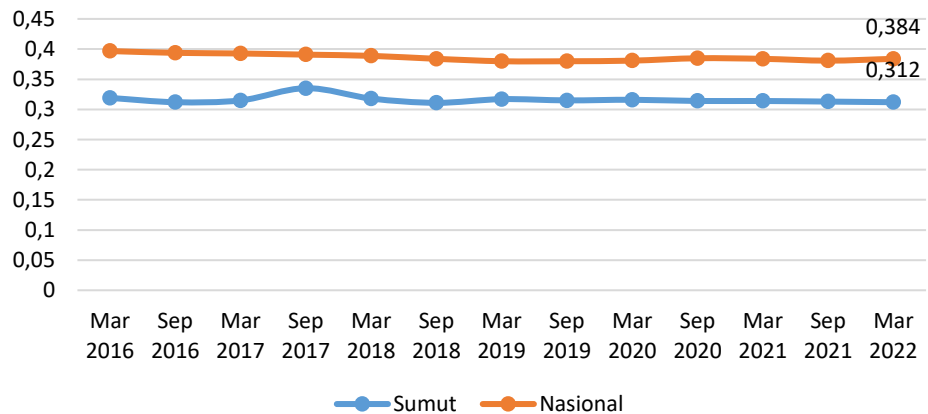
NTP Sumut Naik 8,22% dibanding bulan Juli 2022. Sejalan dengan NTP, NTN juga mengalami kenaikan 0,45% dibanding bulan Juli sebelumnya

PERKEMBANGAN EKONOMI REGIONAL SUMATERA UTARA

Perkembangan PDRB Sumut



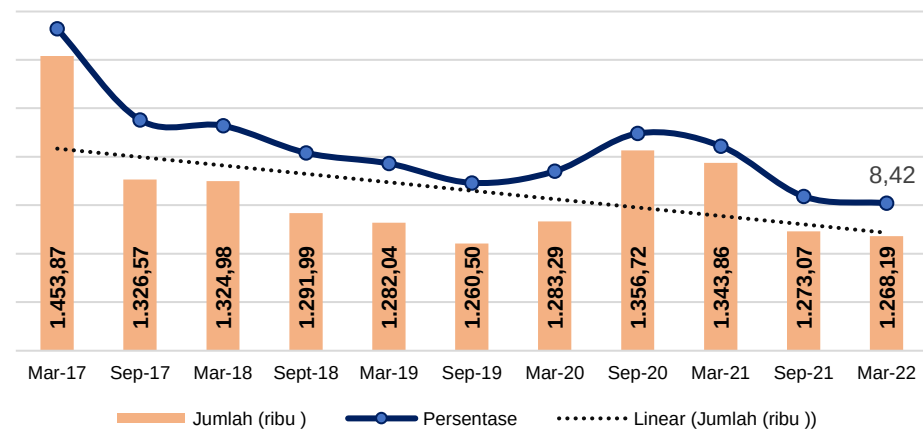
Perkembangan Gini Ratio Sumut



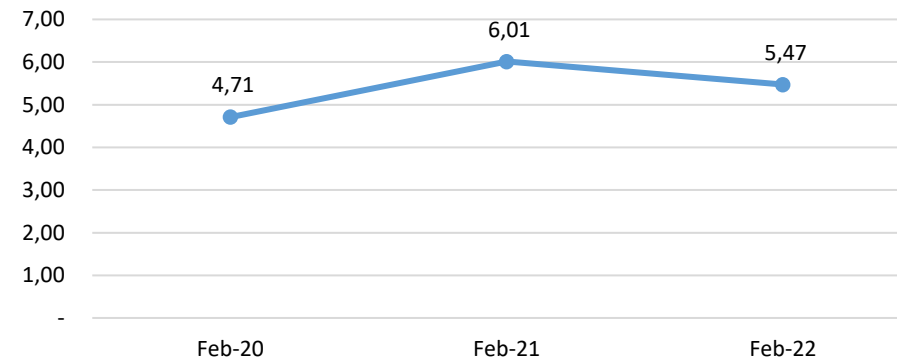
- Gini Rasio Sumut turun 0,02 poin (yoy). Nilai tersebut lebih rendah dibanding nasional.

Sumber : BPS Sumut

Perbandingan jumlah penduduk miskin Pulau Sumatera dan Perkembangan Kemiskinan di Sumut



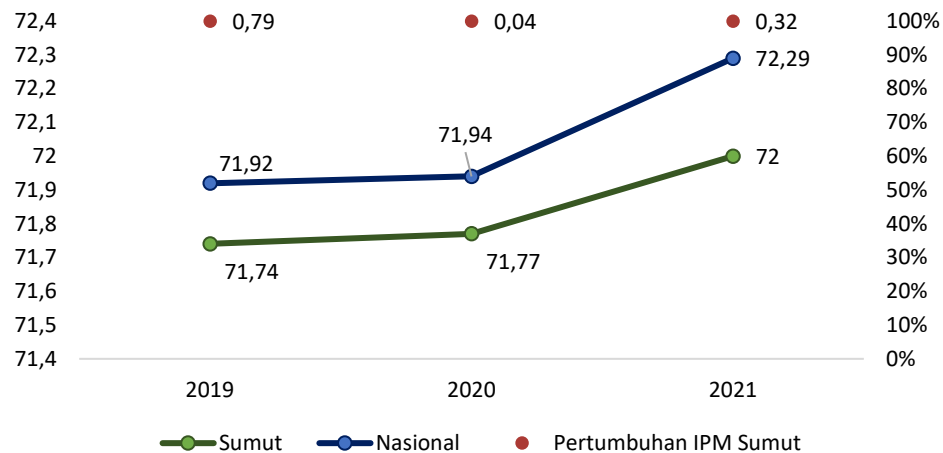
Tingkat Pengangguran Terbuka Sumut



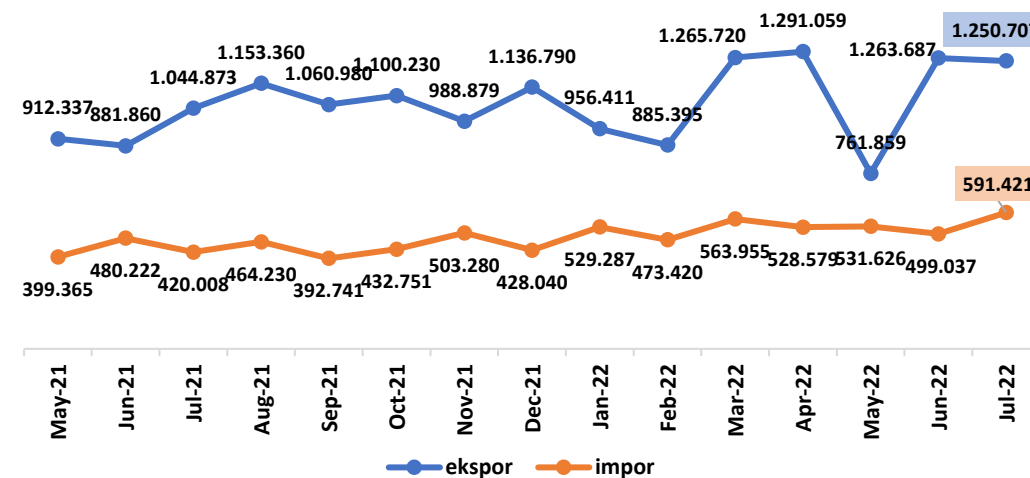


PERKEMBANGAN EKONOMI REGIONAL SUMATERA UTARA

Indeks Pembangunan Manusia Sumut



Ekspor-Impor Sumut



LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK

September 2021

1,23%



ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH



USIA 7-12:
↑ 99,32%

USIA 13-15:
↑ 96,99%

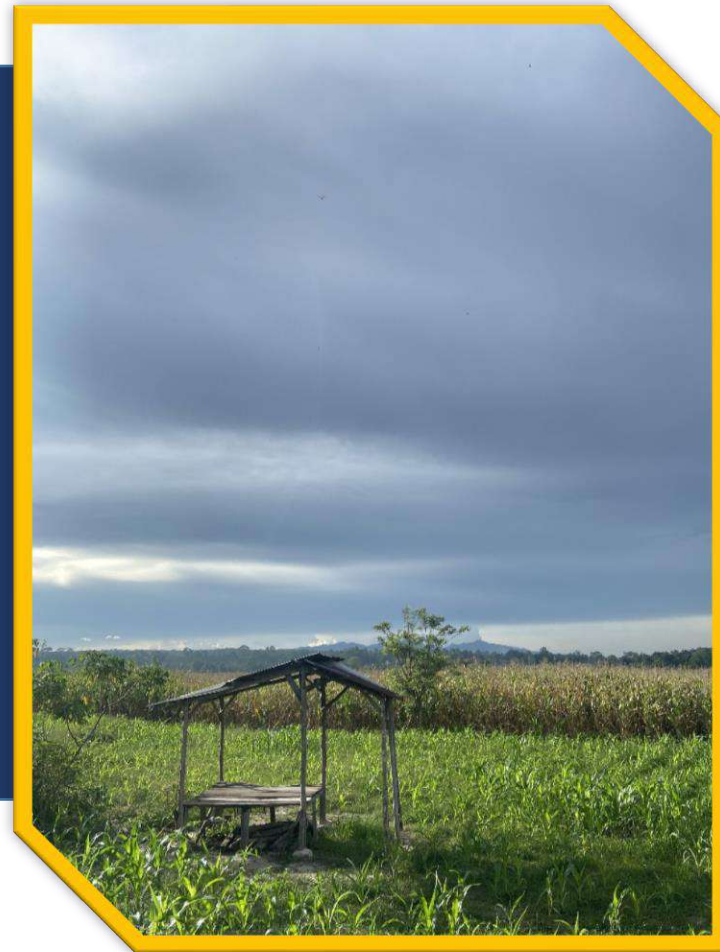
USIA 16-18:
↓ 78,66%

USIA 19-24:
↑ 27,05%





Analisis Reguler di Regional Provinsi Sumatera Utara



Tepi Sawah Tiga Balata



Current Issues di Regional Sumatera Utara

Inflasi di Wilayah Sumut bulan Juli dan Agustus

No	Kota	m to m		y on y	
		Juli 2022	Agustus 2022	Juli 2022	Agustus 2022
1	Sibolga	1,07	-0,02	6,97	6,91
2	Pematangsiantar	0,04	-0,79	5,78	5,01
3	Medan	0,27	-0,25	5,46	5,3
4	Padangsidempuan	0,59	-0,31	7,15	6,56
5	Gunung Sitoli	1,81	-1,43	7,8	6,37

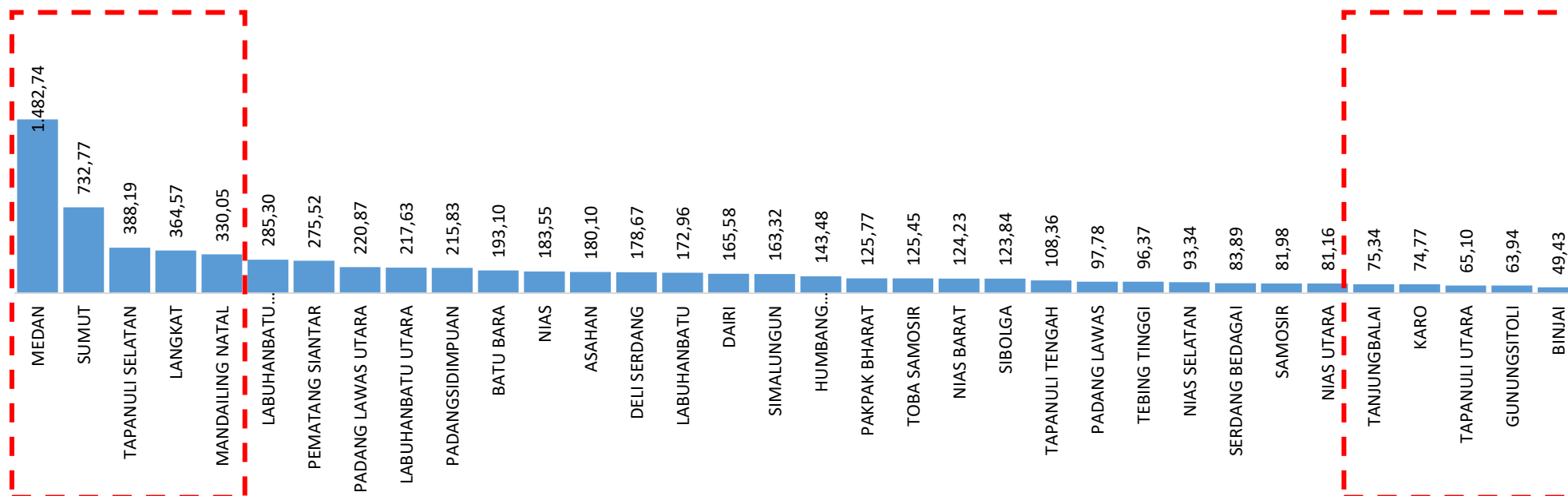
Pada Agustus 2022 Sumut mengalami deflasi sebesar 0,3 persen disebabkan oleh karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh turunnya indeks harga kelompok pengeluaran. Komoditas utama penyumbang deflasi selama Agustus 2022 antara lain, bawang merah, cabai rawit, cabai merah, angkutan udara, tomat, parfum, dan cabai hijau. Selain itu, rencana kenaikan harga BBM pada bulan September 2022 berpotensi akan menaikkan inflasi dan tingkat suku bunga BI. Akibatnya diprediksi pada triwulan IV terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi

Sumber :BPS Sumut diolah



Current Issues di Regional Sumatera Utara

Saldo Kas RKUD per 31 Agustus 2022



Total Saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) di wilayah Sumatera Utara secara agregat sebesar Rp7,36 T. Saldo kas di RKUD yang cukup besar sampai dengan Agustus 2022 disebabkan oleh belum optimalnya realisasi belanja daerah.

Sumber : Kantor Pusat DJPb



↑
67,01%
dari 31 Juli

**810
KASUS
AKTIF**

KASUS POSITIF KUMULATIF

Sumut : 158.171
Nasional : 6.354.245

TOTAL SEMBUH

154.082

VAKSINASI SUMUT



Dosis 1 : 11.199.964 (98,08%)
Dosis 2 : 9.577.925 (83,87%)
Dosis 3 : 3.667.203 (37,30%)

Kewaspadaan:

Kasus Covid-19 Sumut meningkat, perlu diwaspadai varian baru Omicron BA.4 dan BA.5 yang sudah muncul di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu kewaspadaan pada lingkungan masyarakat dan lingkungan kerja untuk tetap menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah persebaran Covid-19 di wilayah Sumut.

Sumber : covid19.sumutprov.go.id



PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL SUMUT S.D 31 Agustus 2022

Realisasi Program PEN di wilayah Sumut sebesar Rp5.598,45 M, dominan pada Kluster Perlindungan Masyarakat untuk memperkuat daya beli masyarakat rentan.

Rp1.039,35 M

Penanganan Kesehatan

- Klaim Pasien Rp862,73 M, kepada 112 Rumah Sakit dan 15.472 Pasien;
- insentif Nakes Rp176,62 M, kepada 39,321 Nakes yang terdapat pada 180 faskes

Rp3.637,34 M

Perlindungan Masyarakat

- PKH Rp1.190,50 M kepada 1.403.373 KPM;
- Sembako Rp1.129,46 M kepada 2,64 Juta KPM
- BLT Minyak Goreng Rp228,74 M kepada 2,29 Juta KPM
- BLT Desa Rp1.088,64 M

Penguatan Pemulihan Ekonomi

Rp921,76 M

- Padat Karya PUPR Rp319,67 M untuk 15.516 tenaga kerja
- Pariwisata Rp250,18 M
- Ketahanan Pangan Rp106,75 M
- Infastrutur Konektivitas PUPR Rp245,16 M

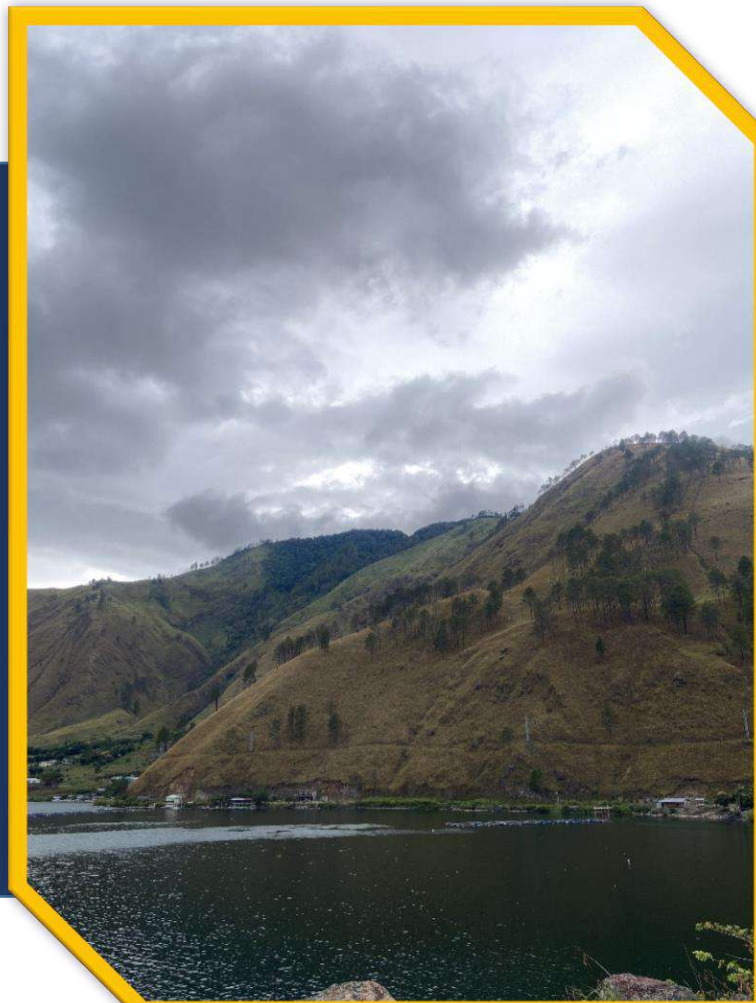
Ditengah Risiko ketidakpastian global yang eskalatif:

- Peran APBN sebagai **shock absorber** perlu dijaga agar berfungsi optimal
- Program PC-PEN harus responsive dan antisipatif

Sumber : Kantor Pusat DJPb dan OM-SPAN



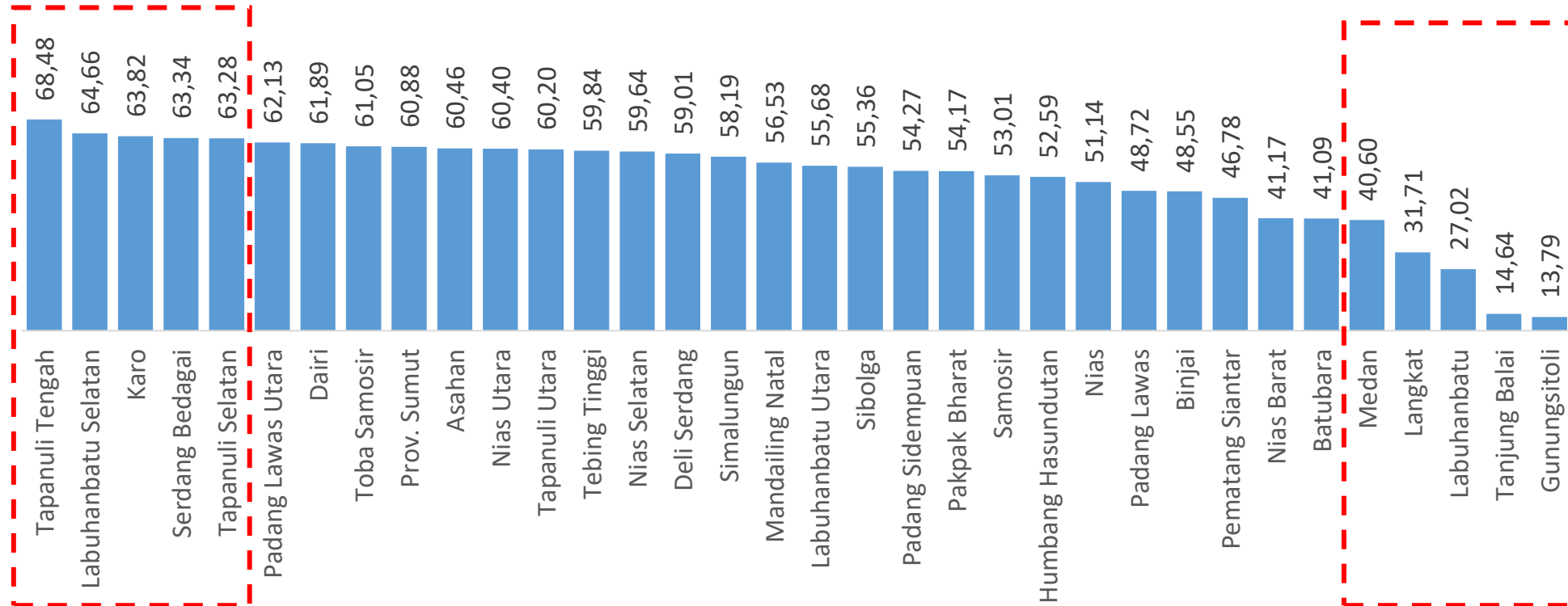
ANALISIS ISU TEMATIK YANG BERPOTENSI BERDAMPAK PADA LEVEL NASIONAL



Bukit Paropo - Silalahi

Analisis Isu Tematik

Realisasi Belanja APBD Kab/Kota s.d 31 Agustus 2022 (%)



Realisasi Belanja Pemda s.d 31 Agustus 2022 masih rendah, dengan penyerapan tertinggi sebesar 68,48% pada Kab. Tapanuli Tengah dan penyerapan terendah sebesar 13,79% pada Kota Gunung Sitoli. Penyerapan anggaran pemda yang belum optimal ini berdampak pada SiLPA Pemda yang besar setiap tahunnya.



Analisis Isu Tematik

- a. Faktor-faktor yang memengaruhi belum optimalnya penyerapan anggaran Pemda:
 1. Perencanaan anggaran

Konsep perencanaan penggunaan anggaran secara riil tidak dilakukan dengan optimal yang berdampak pada munculnya sejumlah kesulitan dalam mengarahkan penggunaan anggaran dengan tepat sasaran;
 2. Pelaksanaan anggaran
 - a. Keterlambatan pelaksanaan lelang
 - b. Pola pengajuan tagihan akhir tahun, setelah penyelesaian fisik 100 persen
Pengadaan barang/jasa belum mengajukan permohonan pembayaran atas penyelesaian fisik sesuai dengan termin yang diatur dalam perjanjian kontrak dengan pihak ketiga;
 3. Sumber Daya Manusia

Kurangnya jumlah pegawai, pola mutasi pegawai, adanya perangkatan jabatan berdampak pada keterlambatan realisasi anggaran;
 4. Tingginya saldo kas daerah (RKUD) di Perbankan
 - a. Terdapat indikasi uang kas yang tersimpan di perbankan diorientasikan sebagai tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau dalam hal ini adalah bunga perbankan
 - b. Belum disalurkan untuk hasil pajak yang dipungut provinsi kepada kabupaten/kota, termasuk kelebihan target pajak daerah tahun sebelumnya.

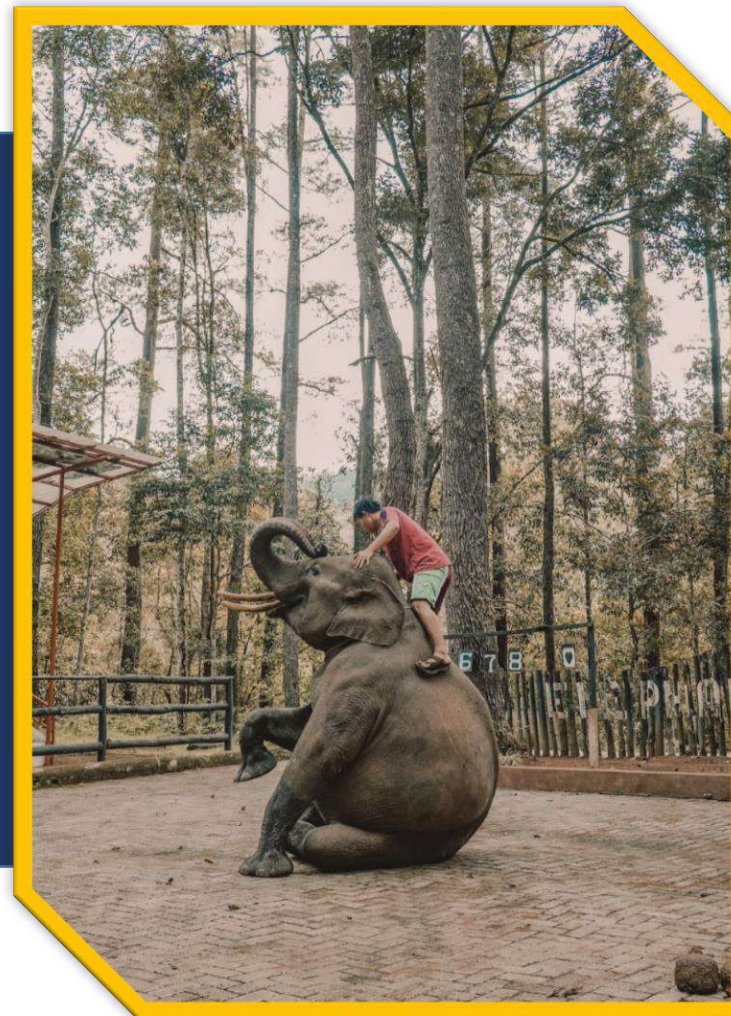


Analisis Isu Tematik

- b. Solusi terhadap faktor rendahnya penyerapan anggaran Pemda:
1. Meningkatkan kapasitas para pengelola keuangan satker dalam menyusun rencana penarikan dana dan rencana pengadaan;
 2. Meningkatkan peran aparat pengawas intern pemerintah daerah maupun unit pengendali mutu di setiap pemerintah daerah dalam melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing OPD;
 3. Pemda harus menciptakan/memaksimalkan sumber pendapatan asli daerah yang lain dan tidak mengharapkan imbal hasil dari menumpuknya saldo kas di perbankan.



Policy Response



Konservasi Gajah Aek Nauli



Policy Response

No.	Permasalahan Fiskal	Dampak Negatif yang mungkin timbul	Rekomendasi
1.	Rencana kenaikan harga BBM pada September 2022	Potensi kenaikan inflasi dan kenaikan suku bunga BI pada September 2022	1. Peran TPID Sumut dalam usaha stabilisasi harga dan ketahanan pangan serta pelaksanaan Operasi Pasar dalam memastikan harga pangan yang terjangkau; 2. Percepatan Implementasi Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diatur dalam PMK-134/PMK.07/2022.
2	Saldo kas di RKUD yang cukup besar sampai dengan Agustus 2022 disebabkan oleh belum optimalnya realisasi belanja daerah.	Saldo kas yang tinggi menunjukkan penyerapan yang masih kecil. Hal ini akan berdampak pada saldo kas pada akhir tahun anggaran. Apabila saldo kas akhir tahun tinggi menunjukkan perencanaan anggaran dan belanja yang belum efisien	Perlunya akselerasi belanja sehingga mampu meningkatkan ekonomi di Sumut



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perbendaharaan



TERIMA KASIH